

IMPLEMENTASI KURIKULUM KEBAHARIAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL¹

Oleh: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. Nono Sampono, M.Si, S.Pi²

PENDAHULUAN

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Visi tersebut adalah suatu cita-cita yang sangat tepat bagi bangsa Indonesia dan juga merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini mengingat, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari 13 ribu pulau dengan sebagian besar wilayahnya (sekitar 70%) adalah berupa lautan yang sekaligus menjadi penghubung dua samudera utama dunia, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Tambahan pula, perairan laut di Indonesia dikenal sebagai salah satu daerah “*mega biodiversity*” penting di dunia dan juga mengandung potensi sumber daya yang tidak sedikit, baik berupa keanekaragaman sumber daya alam dan sumber daya buatan, seperti: jasa-jasa lingkungan. Sebagai salah satu gambarnya adalah lebih dari 75 persen barang dan komoditas yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut dan 45 persennya setara USD 1.500 triliun pertahun barang dan komoditas diperdagangkan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia³.

Selain itu, gagasan Poros Maritim Dunia juga sekaligus akan mengembalikan jati diri bangsa Indonesia yang seharusnya dijalankan sesuai dengan karakteristik geografis yang dimilikinya sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) dalam mewujudkan cita-cita utamanya melalui proses pembangunan nasionalnya. Kemudian, agar visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia tersebut dapat terwujud, maka dalam agenda pembangunannya ditetapkan lima pilar utama, yakni pembangunan budaya maritim, menjaga dan mengelola sumber daya laut, mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan membangun kekuatan pertahanan keamanan maritim.

Pada pilar pertama, yakni pembangunan kembali budaya maritim Indonesia ditujukan untuk mengembalikan jati diri bangsa Indonesia yang harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola lautan yang luasnya sekitar 70% dari total wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian, pada pilar kedua, yakni menjaga dan mengelola sumber daya laut nasional difokuskan

¹ Disampaikan dalam Seminar OPTIMALISASI IMPLEMENTASI KURIKULUM KEBAHARIAN DALAM MEMBENTUK KELAUTAN SEBAGAI POROS KEHIDUPAN NASIONAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN POROS MARITIM DUNIA, Oleh Yayasan Hang Tuah, Rabu, 19 Agustus 2015

² Anggota DPD RI 2014-2019 dan Mantan Komandan Korps Marinir, Kepala Basarnas, Gubernur AAL, Danpaspampres

³Dahuri, R. 2014. <http://ugm.ac.id/id/berita/9256-potensi.kelautan.indonesia.12.triliun.belum.digarap.maksimal>

untuk membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai aktor utamanya, agar dapat digunakan sebesar-sebesarnya bagi kepentingan rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada pilar ketiga, yakni mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim ditujukan untuk efektif dan efisiennya sistem transportasi laut nasional, sehingga meningkatkan daya saing produk-produk nasional ditingkat dunia, melalui pembangun tol laut, pelabuhan laut dalam (*deep seaport*), logistik, dan industri perkapalan. Untuk pilar keempat, yakni diplomasi maritim ditujukan guna mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan dalam upaya bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Dan pada pilar yang terakhir, yakni membangun kekuatan pertahanan maritim nasional ditujukan untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim nasional dan juga sekaligus juga bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim regional dan global sebagai konsekuensi negara yang menjadi titik tumpu dua samudera dunia.

Visi Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia tentu bukan merupakan perkara mudah untuk mewujudkannya. Karena bukan hanya sekedar membangun aspek ekonomi semata, melainkan juga berkaitan dengan aspek kedaulatan dan kebudayaan bangsa Indonesia di masa depan. Kesadaran para pemimpin bangsa serta seluruh komponen masyarakat Indonesia akan "arti laut" bagi negara tercinta, patut dibangkitkan kembali sehingga dapat terimplementasikan secara nyata dalam wujud kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, perlu melakukan terobosan berani sejak dini melalui re-orientasi atau membangun *mindset* (pola pikir) akan pentingnya membangun paradigma jati diri bangsa Indonesia secara obyektif sesuai dengan karakteristik geografisnya yang berlandaskan kepulauan atau *archipelagic oriented*.

Salah satu strategi yang sangat mendasar untuk membangun kesadaran terhadap wilayah nasional merupakan ruang hidup bangsa serta membentuk Sumber Daya Manusia berkarakter maritim adalah melalui pendidikan. Sistem pendidikan nasional diharapkan juga mampu melakukan re-orientasi terhadap visi dan misi bangsa yang terlalu berbasis kontinental ke basis maritim.

Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Yayasan Hang Tuah yang telah memanfaatkan momentum visi-misi pemerintah saat ini, yakni "Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia" dengan menyelenggarakan seminar bertemakan "**OPTIMALISASI IMPLEMENTASI KURIKULUM KEBAHARIAN DALAM MEMBENTUK KELAUTAN SEBAGAI POROS KEHIDUPAN NASIONAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN POROS MARITIM DUNIA**" sebagai salah satu upaya dalam rangka menumbuhkan dan menciptakan anak didik untuk memahami betapa pentingnya wawasan kebaharian nusantara.

Seminar ini tentu hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam menyempurnakan kurikulum nasional terkait dengan menciptakan generasi mendatang yang memiliki jati diri sesuai dengan kondisi obyektif bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan, dan juga generasi yang mumpuni dalam menjaga, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya lautnya. Kurikulum bermuatan kebaharian dan maritim, harus sesegera mungkin diterapkan dalam pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, agar visi-misi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dapat segera terwujud.

RUANG HIDUP BANGSA

Wilayah nasional adalah ruang hidup sebuah bangsa yang merupakan modal dasar kodrati untuk didayagunakan bagi kehidupan negara. Wilayah nasional juga bukan hanya bermakna politik dan hukum, tetapi merupakan wilayah ekonomi, budaya, posisi kekuasaan serta wilayah pertahanan negara demi tegaknya kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan bangsa dan sekaligus keutuhan wilayah nasionalnya.

Pengetahuan manusia yang lebih luas tentang geografi dan politik dunia dimulai pada abad ke -19 yang dipelopori oleh Frierich Ratzel yang mengatakan “Life as a fight for space” (hidup sebagai perjuangan merebut ruang). Lebih lanjut dikatakan, “...every nation has a space conception, that is and idea about the possible limit of its territorial dominion...The decay of every state is the result of a declaining space conception...” (Andrew Gyorgy, Geopolitics edition 1971). Kemudian muncul Rudolf Kjellen, Halford Mackinder dan Karl Haushofer, menyuburkan tumbuhnya ide-ide ekspansionistis bagi bangsa-bangsa Eropa, namun lebih berorientasi pada kontinental. Sehingga terjadi ekspansi dan pendudukan terhadap daratan Eropa oleh Perancis dan Jerman. Namun, teori ini kemudian dipatahkan oleh Laksmana Mahan bahwa untuk menguasai dunia harus menguasai laut. Inilah yang membuat hadirnya bangsa-bangsa barat membangun koloni-koloni diberbagai kawasan dunia termasuk di Nusantara.

Dari gambaran tersebut diatas, meskipun geopolitik pernah disalahgunakan dalam memperluas wilayah negara, tetapi saat ini geopolitik masih relevan sebagai basis ilmu untuk merumuskan strategi dan kebijakan membangun sebuah negara untuk mendapatkan keamanan dan kesejahteraan bangsanya.

Bung Karno mengingatkan pada kuliah perdana pada saat pembentukan LEMHANAS pada tanggal 20 Mei 1965 sebagai berikut:

“Untuk membangun ketahanan nasional yang kuat harus mempertimbangkan kondisi obyektif bangsa :

1. Indonesia adalah negara kepulauan
2. Indonesia berada di posisi silang diantara dua benua dan dua samudera
3. Kekayaan SDA yang melimpah

4. Bangsa Indonesia merupakan Quaras dari bangsa-bangsa Pasifik dan Afrika
5. Memiliki atau terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan

Inilah yang kita kenal sebagai pokok-pokok pikiran (Political Strategical Guidance) tentang Ketahanan Nasional Indonesia sekaligus merupakan Geopolitik Indonesia.

SEJARAH KEMARITIMAN NUSANTARA

Pandangan bahwa laut merupakan kehidupan, tempat banyak orang bergantung kiranya sulit dipungkiri. Menelusuri kilas balik sejarah kemaritiman di Indonesia, secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga fase:

1) Fase Pra-Sejarah hingga Abad 16 M

Sejak jaman pra sejarah manusia yang mendiami kepulauan Nusantara sudah mampu berlayar hingga Barat Afrika. Secara geografis, Nusantara yang menjadi cikal bakal Republik Indonesia lebih tepat disebut negara kelautan. Sebutan itu merupakan *archipelago state* yang berasal dari bahasa Yunani. Istilah tersebut terdiri dari dua suku kata, *Arche* berarti utama dan *Pelago* yang artinya laut, jadi laut yang utama⁴.

Sejarah Nusantara dimulai dengan adanya para cendekiawan India yang menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatra sekitar 200 SM. Pada abad ke-5 berdiri dua kerajaan bercorak Hinduisme: Kerajaan Tarumanagara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Pada tahun 425 M agama Buddha telah mencapai wilayah tersebut. Menurut Taufik Abdullah⁵ masa kejayaan cikal bakal negara Indonesia telah terjadi pada jaman kerajaan-kerajaan Sriwijaya di abad ke 7 dan 8 saat Sriwijaya dianggap ancaman oleh negara Kambojya dan disebut sebagai "Maharaja". Hal yang senada dikemukakan oleh Lilik Abu Siswanto, Letkol Laut (P)⁶, dalam suatu Artikel Cakrawala TNI AL yaitu sebagai contoh bahwa kita pernah jaya di laut yaitu pada sejarah Kerajaan Sriwijaya yang merupakan suatu negara maritim yang besar dan kuat pada zamannya dan menguasai perdagangan di Selat Malaka. Semua kapal dagang yang melewatinya harus membayar upeti dan bagi yang membangkang kapalnya akan diserang dan ditenggelamkan. Dari hasil upeti tersebut, Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang kaya raya. Puncak kejayaan Sriwijaya adalah sekitar abad-9, yakni pada

⁴Zuhdi, S.2014. Nasionalisme, Laut dan Sejarah

⁵Laut Dalam Sejarah Dan Struktur Kesadaran. Makalah Untuk REMBUG NASIONAL KELAUTAN, IPB Bogor, 30 -31 Januari 2009.

⁶Sejarah Singkat Kejayaan Budaya Bahari Nusantara pada Artikel Cakrawala TNI AL.<http://www.tnial.mil.id/Majalah/Cakrawala/ArtikelCakrawala/tabid/125/Default.aspx>

masa pemerintahan Raja Balaputradewa. Sejarah juga mencatat bahwa Kerajaan Majapahit (abad ke 13 dan 14, yaitu pada tahun 1251-1459 Masehi) di Pulau Jawa dengan Raden Wijaya yang bergelar Sri Kertanegara Jayawardhana sebagai Raja Majapahit pertama telah berkembang dan mencapai kebesarannya pada saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada memegang kekuasaan pada pertengahan abad 14. Sebagian besar wilayah Nusantara dapat ditaklukkan. Bahkan pengaruhnya sampai ke Malaysia dan Singapura, meskipun tidak menguasai kerajaan Sunda di Jawa Barat. Untuk mengawasi daerah kekuasaannya Majapahit membangun armada laut yang sangat kuat, yang digunakan untuk mengawasi perdagangan dan lalu lintas pelayaran di wilayah Nusantara. Kebesarannya tidak hanya diakui oleh kerajaan-kerajaan Nusantara saja, tetapi juga sampai ke daratan Asia. Kepiawaian Mahapatih Gajah Mada dalam menyusun strategi perang laut menjadikan angkatan laut Kerajaan Majapahit disegani ketangguhannya dan tak ada tandingannya di Asia Tenggara.

Di Pulau Jawa selanjutnya kekuasaan berganti-ganti mulai dari kerajaan Singasari, Majapahit, bahkan juga, kemudian, di awal abad ke 16, kota-kota pantai Utara Jawa, yang telah menganut Islam juga tak pernah melupakan pentingnya perairan Selat Malaka bagi perdagangan dan perluasan wilayah pengaruh. Sejak itu pusat-pusat kekuasaan maritim di Pulau Jawa yang timbul tenggelam itu melibatkan diri dalam perebutan hegemoni di perairan laut Jawa sampai Selat Malaka. Pada fase ini dapat dinyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia mengalami masa-masa kejayaan maritim.

2) Fase Masa Penjajahan (Abad 16 M hingga 1945)

Mulai tahun 1602, Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa di bumi Nusantara, dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-keajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Belanda mengembangkan wilayah jajahan ini menjadi Hindia-Belanda selama 350 tahun sebagai salah satu kekuasaan kolonial terkaya di dunia. Sejak tenggelamnya masa kejayaan maritim Nusantara pada awal abad 16 itu, dalam perjalanannya kemudian sejarah membawa bangsa Indonesia ke masa kelam sebagai bangsa jajahan yang tertindas bangsa lain.

Sejak masuknya penjajah Eropa, utamanya Belanda ke bumi nusantara, saat itulah dunia kemaritiman Nusantara mengalami masa suram. Dengan kehadiran bangsa-bangsa barat di Nusantara dengan kekuatan armada niaga dan militer yang lebih kuat menenggelamkan kekuatan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan-kerajaan nusantara diperlemah kekuataannya maritimnya dan dipaksakan untuk menjadi imperium pedalaman yang penuh dengan mistik-mistik terutama, apriori terhadap laut. Seperti legenda Nyi Roro Kidul. Seperti yang dikatakan oleh Raden Fatah yang ditulis

kembali oleh Pramudia Ananta Toer dalam bukunya Arus Balik: *Hancurnya Kerajaan-Kerajaan di Nusantara karena singgasana rajanya dipalingkan dari laut*.

Bahkan, Belanda secara perlahan melalui rekayasa sosial dan militer berhasil merubah paradigma jati diri rakyat Nusantara pada saat itu, dari yang semula merupakan bangsa bahari menjadi bangsa agraris (*land based oriented*). Kolonialisme menyebabkan perubahan cara pandang manusia Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Laut tak lagi menjadi prioritas dan proses meninggalkan laut tersebut terus berlangsung hingga menjelang kemerdekaan. Jadi pada fase ini dapat dinyatakan bahwa visi kemaritiman mengalami kemunduran yang signifikan di bumi Nusantara.

3) Fase Masa Kemerdekaan

Era Orde Lama (1945 - 1965)

Pada awal kemerdekaan, Indonesia masih menggunakan beberapa peraturan hukum yang ditinggalkan Pemerintahan Hindia Belanda, termasuk landasan hukum bidang kelautan, yakni “Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939” (TZMKO). Namun, penggunaan ordonansi ini menyebabkan wilayah Indonesia menjadi tidak utuh, karena perairan diantara kelima pulau besar Indonesia terdapat perairan bebas (*high seas*). Keadaan ini dinilai dapat mengancam keutuhan NKRI. Atas dorongan semangat tinggi dan kebulatan tekad yang luar biasa di masa kepemimpinan Presiden Soekarno, dengan berani dan secara sepihak mengeluarkan suatu deklarasi keutuhan wilayah Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957, yang dikenal dengan Deklarasi Djoeanda. Pada dasarnya konsep deklarasi ini memandang bahwa kepulauan Indonesia merupakan wilayah pulau-pulau, wilayah perairan, dan dasar laut di dalamnya sebagai suatu kesatuan historis, geografis, ekonomis, dan politis. Dengan adanya konsep ini, maka wilayah perairan Nusantara yang tadinya merupakan wilayah laut lepas kini menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia yang berada di bawah kedaulatan NKRI.

Deklarasi Djoeanda merupakan salah satu dari tiga pilar utama bangunan kesatuan dan persatuan negara dan bangsa Indonesia, yaitu: Kesatuan Kejiwaan yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928; Kesatuan Kenegaraan dalam NKRI yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta tanggal 17 Agustus 1945; dan Kesatuan Kewilayahan (darat, laut, dan udara) yang diumumkan H. Djoeanda, 13 Desember 1957. Kemudian, Deklarasi ini diperkuat secara yuridis melalui Undang-Undang No. 4. Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Dalam UU ini, pokok-pokok dasar dan pertimbangan-pertimbangan mengenai pengaturan wilayah perairan Indonesia pada hakikatnya tetap sama dengan Deklarasi Djoeanda, walaupun segi ekonomi dan pengamanan sumberdaya alam lebih ditonjolkan.

Presiden Soekarno belum memiliki kesempatan lebih banyak untuk mengubah paradigma *land based oriented* menjadi *maritime based oriented*, karena terganggu dengan keadaan politik, stabilitas keamanan, dan lain-lain. Dalam rentang waktu 1960-1966 Presiden Soekarno telah mempunyai pandangan mengenai Geopolitik Indonesia: namun belum sempat terlaksana dan terjadi pergantian ke rezim Orde Baru.

Era Orde Baru (1966 - 1998)

Pengembalian laut sebagai sumber utama kehidupan bangsa dapat dinyatakan mengalami kemunduran kembali setelah pemerintahan berpindah tangan ke Presiden Soeharto yang lebih berorientasi ke darat. Pada era Orde Baru (1966-1998), nuansa pembangunan lebih diutamakan pada pembangunan daratan atau kontinental. Walaupun demikian, pada era ini juga lahir konsep besar yang mendukung kemaritiman nasional, yakni tahun 1982 pada saat Menteri Luar Negeri dijabat oleh Mochtar Kusumaatmadja.

Pada tahun 1982, 119 negara di dunia, termasuk Indonesia, telah menandatangani Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Konvensi tersebut di dalamnya memuat 9 buah pasal mengenai perihal ketentuan tentang prinsip “Negara Kepulauan”. Salah satu pasal dalam prinsip Negara Kepulauan tersebut menyatakan bahwa laut bukan sebagai alat pemisah, melainkan sebagai alat yang menyatukan pulau-pulau yang satu dengan lainnya, yang kemudian diimplementasikan oleh Indonesia dengan istilah Wawasan Nusantara.

Pengakuan dunia internasional ini, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya UU Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HUKUM LAUT 1982. Ratifikasi ini merupakan tindak lanjut dari gagasan negara kepulauan yang pada 25 tahun lalu dicetuskannya Deklarasi Djoenda pada tanggal 13 Desember 1957. Sejak itu, Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, dan UU No.17 tahun 1985 ini, selanjutnya harus dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan nasional, utamanya pembangunan dibidang kelautan, dan pada REPELITA ke 5 (1993 – 1998) konsep pembangunan kelautan akhirnya masuk kedalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Namun, mengingat Presiden Soeharto dengan latar belakang seorang anak petani dan sebagai perwira AD tentu lebih berorientasi kepada paradigma kontinental sehingga semua kebijakan dan strategi pembangunan nasional jauh dari aspek maritim atau kelautan.

Era Reformasi (1998 - Sekarang)

Paradigma nasional yang mendukung visi kemaritiman selanjutnya adalah Deklarasi Bunaken yang dicetuskan tanggal 26 September 1998 pada masa pemerintahan Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie. Deklarasi ini pada dasarnya secara tegas menyatakan dua hal pokok yaitu kesadaran bangsa Indonesia akan geografik wilayahnya dan kemauan yang besar dari bangsa Indonesia untuk membangun kelautan. Kesadaran geografik adalah kesadaran bangsa Indonesia untuk memahami dan menyadari akan kondisi obyektif wadah kepulauan Indonesia yang 2/3 (dua per tiga) bagian wilayahnya adalah merupakan laut. Kesadaran bangsa Indonesia akan geografik wilayahnya menjadi sangat penting bagi keberhasilan bangsa dalam melaksanakan pembangunan kelautan yang mempunyai arti strategis dalam mengembalikan kondisi ekonomi nasional yang sedang menyelesaikan berbagai krisis ini.

Inti dari Deklarasi Bunaken adalah laut merupakan peluang, tantangan dan harapan untuk masa depan persatuan, kesatuan dan pembangunan bangsa Indonesia. Deklarasi Bunaken merupakan pernyataan politis strategis pemerintah atau sebagai komitmen bangsa yang memberikan peluang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kelautan. Melalui Deklarasi Bunaken, pemerintah juga akan mengorientasikan Pembangunan Nasional ke laut dengan memberikan perhatian dan dukungan optimal terhadap pembangunan kelautan.

Deklarasi Bunaken dapat juga dikatakan sebagai kunci pembuka babak baru pembangunan nasional yang berorientasi ke laut karena mengandung komitmen bahwa: *Pertama*, visi pembangunan dan persatuan nasional Indonesia harus juga berorientasi ke laut dan *Kedua*, Semua jajaran pemerintah dan masyarakat hendaknya juga memberikan perhatian untuk pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan potensi kelautan Indonesia.

Kemudian, pada masa pemerintahan, tumbuh kesadaran bahwa potensi dan kekayaan yang ada di laut merupakan sumber ekonomi utama Negara. Laut adalah kehidupan masa depan bangsa. Atas pemikiran ini, maka Presiden Abdurrahman Wahid membentuk kementerian baru yakni Departemen Eksplorasi Laut dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999. Dalam perjalanannya, namanya berubah-ubah dan akhirnya saat ini menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid juga dibentuk Dewan Maritim Indonesia (DMI) yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program pembangunan kelautan di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2001, tepatnya tanggal 27 Desember 2001, bertempat di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa Jakarta, Presiden RI Megawati Sukarnoputri telah mencanangkan "Seruan Sunda Kelapa". Pada intinya seruan tersebut mengajak

seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama membangun kekuatan maritim/kelautan, dengan berlandaskan pada kesadaran penuh bahwa bangsa Indonesia hidup di negara kepulauan terbesar di dunia, dengan alam laut yang kaya akan berbagai sumberdaya alam.

Pada Seruan Sunda Kelapa menyatakan meliputi 5 pilar program pembangunan kelautan, yaitu:

1. Membangun kembali wawasan bahari,
2. Menegakkan kedaulatan secara nyata di laut,
3. Mengembangkan industri dan jasa maritim secara optimal dan lestari bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
4. Mengelola kawasan pesisir, laut dan pulau kecil, dan
5. Mengembangkan hukum nasional di bidang maritim.

Dengan lahirnya Seruan Sunda Kelapa diharapkan menimbulkan kesadaran dan mengarahkan kembali bangsa Indonesia ke wawasan bahari. Dengan demikian, Seruan Sunda Kelapa merupakan paradigma nasional untuk membangkitkan visi maritim nasional untuk memberi kontribusi nyata bagi pertumbuhan perekonomian nasional, membangkitkan kembali kekuatan armada niaga nasional, mempercepat penggapaian masa depan bangsa, dan sekaligus memperkuat tali kehidupan bangsa.

Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nomenklatur Dewan Maritim Indonesia (DMI) diganti menjadi Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) melalui Keppres No.21 Tahun 2007 dan menyelenggarakan konferansi kelautan dunia atau *World Ocean Conference (WOC)* di Manado pada tanggal 11 – 15 Mei 2009. Kegiatan ini merupakan inisiatif Indonesia dalam forum internasional yang ditujukan bagi para pemimpin dunia dan pengambil keputusan untuk mengembangkan kolaborasi internasional dan membuat komitmen bersama dalam menghadapi isu kelautan dunia dan sekaligus masalah perubahan iklim global. Penyelenggaraan WOC 2009 didukung oleh 123 negara yang tergabung dalam *The Eighteenth Meeting of States Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea* dan dalam pelaksanaannya dihadiri oleh 423 delegasi yang berasal dari 87 negara dan organisasi-organisasi antar negara.

Deklarasi Kelautan Manado (*Manado Ocean Declaration*) yang menjadi menjadi salah satu output utama dari WOC 2009 ini merupakan tonggak sejarah dan dokumen penting untuk menyelamatkan planet bumi dan kelangsungan hidup generasi penerus dimasa akan datang, sehingga dokumen tersebut akan diperjuangkan oleh wakil tetap pemerintah Indonesia di PBB untuk dimasukkan dalam agenda resmi dan dibahas dalam *Meeting of the States Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea*. Selain itu, output lainnya, yakni *CTI Regional Plan of Action* yang dilakukan oleh 6 negara, juga merupakan hal penting dalam menyelamatkan keanekaragaman sumber daya hayati laut dunia, utamanya ikan dan terumbu karang. Dengan demikian, WOC

2009 dapat dinyatakan sebagai komitmen Bangsa Indonesia dalam upaya mengembangkan, mengelola, dan melestarikan sumber daya laut nasional dan internasional secara berkelanjutan.

PARADIGMA PEMBANGUNAN WAWASAN KEMARITIMAN NUSANTARA

Bangsa Indonesia, walaupun telah banyak kebijakan dan doktrin untuk mengembalikan kejayaan maritim seperti masa lampau sebelum masa penjajahan Belanda, yang lahir di era orde lama hingga orde reformasi, namun tetap dapat dinyatakan hingga kini orientasi bangsa Indonesia kearah kemaritiman belum optimal, baik pada bidang ekonominya, sosial dan budayanya, maupun bidang pertahanannya. Kehilangan orientasi terhadap visi maritim tersebut tentu menjadi salah satu penyebab utama, mengapa paradigma pembangunan nasional kita belum berbasis kemaritiman atau kelautan. Untuk itu perlu dilakukan upaya optimalisasi untuk re-orientasi hal tersebut. Setidaknya, terdapat 4 (empat) poin yang selama ini telah tergerus dan menjadi kehilangan orientasi visi kemaritiman, yakni:

1. Kehilangan orientasi akan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (maritim) terbesar di dunia.
2. Kehilangan orientasi wawasan nasional atau wawasan Nusantara akan nilai-nilai kebaharian.
3. Kehilangan orientasi akan kesadaran pentingnya laut bagi Indonesia.
4. Kehilangan orientasi akan kesadaran diri sendiri terhadap nilai-nilai kebaharian.

Kita patut bersyukur bahwa terjadi sebuah perubahan paradigma nasional yang yang dicanangkannya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 November 2014 di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Naypyidaw, Myanmar. Pada acara tersebut Presiden Joko Widodo mengumumkan hasrat Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Untuk itu, Indonesia akan membangun kembali budaya maritim, menjaga dan mengelola sumber daya laut, memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritim, membangun pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, serta melalui diplomasi maritim mengajak mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama dalam bidang kelautan dan meniadakan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, penyelundupan, perompakan laut, dan sengketa wilayah.

Ini bukan hanya sekedar gagasan, tetapi merupakan :

1. Visi dan cita-cita besar membangun Indonesia sebagai seruan untuk kembali ke jatidiri bangsa sebagai bangsa bahari dan negara maritim sekaligus ingin membangun kekuatan maritim untuk Indonesia yang bersatu (unity), sejahtera (prosperity), dan berwibawa (dignity).
2. Doktrin yang merupakan arahan mencapai tujuan bersama (a sense of common purpose), mengajak kita untuk melihat diri sendiri sebagai negara kepulauan

terbesar di dunia, serta realita posisi Geografi, Geostrategi, Geopolitik, dan geo ekonomi.

3. Upaya implementatif dan operasional untuk membangun kejayaan politik, ekonomi, dan keamanan melalui dibangun Tol Laut.

Dengan demikian, Presiden Joko Widodo bermaksud akan mengembalikan kembali kejayaan maritim bangsa Indonesia seperti pada masa-masa keemasan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.

OPTIMALISASI IMPLEMENTASI KURIKULUM KEBAHARIAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Sistem Pendidikan Nasional

Perubahan orientasi dari visi daratan ke visi kelautan/maritim memang membutuhkan waktu atau proses yang relatif panjang. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian semua instansi pemerintah terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemendikbud) serta Kementerian teknis lainnya yang terkait dengan sektor kelautan. Kemendikbud dan Kemendikbud sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan di Indonesia seharusnya menyusun suatu sistem kurikulum pendidikan nasional mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi berdasarkan pada kebutuhan bangsa akan generasi penerus yang mengerti akan potensi bangsanya. Salah satunya adalah potensi kelautan atau kemaritiman. Akan tetapi, hingga kini proporsi aspek kelautan pada kurikulum sistem pendidikan nasional masih relatif minim, khususnya pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Hanya pada level pendidikan tinggi, masyarakat (peserta didik) memiliki pilihan yang relatif beragam untuk memperoleh pendidikan kelautan yang diinginkan.

Fakta tersebut memberikan indikasi bahwa dari segi pendidikan formal, kurikulum pendidikan nasional yang diterapkan masih belum mampu mengakomodir kepentingan akan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang memahami dengan baik tentang dunia kelautan atau kemaritiman. Terlebih lagi, anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga yang mayoritas berada dalam kesulitan ekonomi, masih sangat kurang mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak sesuai haknya. Padahal, aspek kelautan atau kemaritiman suatu negara akan maju apabila didukung oleh kemampuan SDM di bidang kelautan yang handal. Oleh karena itu, langkah-langkah menuju ke arah tersebut perlu segera dilakukan, mulai dari inisiasi dini pengenalan dunia kelautan atau kemaritiman hingga pendalaman teknologi terkini terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan potensi kelautan atau kemaritiman di Indonesia.

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam rangka mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan serta peningkatan relevansi pendidikan yang dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan SDM berbasis potensi sumber daya alam Indonesia, maka pendidikan nasional di Indonesia dilaksanakan berdasarkan PP No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Nasional yang didalamnya terdapat pedoman dalam penyusunan kurikulum untuk pendidikan dasar hingga menengah. Pedoman inilah yang dijadikan acuan dalam penyusunan materi ajar di seluruh Nusantara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1), kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
- b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
- c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Kelompok mata pelajaran estetika;
- e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Apabila melihat pada unsur kelompok mata pelajaran di atas, maka bidang kelautan dapat dimasukkan pada kelompok ilmu pengetahuan dan dan teknologi. Sementara masih menurut PP No. 19 Tahun 2005, uraian untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi mencakup :

- a. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri.
- b. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri.
- c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri.

- d. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian kerja.

Meskipun secara tersurat tidak disebutkan proporsi bidang ilmu kelautan, namun pada pelaksanaannya siswa pada level pendidikan menengah (SMP, SMA dan SMK) sudah mendapatkan pengajaran terkait dengan bidang kelautan, meskipun dalam jumlah yang masih minim, kecuali pada sekolah-sekolah khusus seperti SMA/SMK bidang kelautan. Pada sekolah-sekolah yang memberikan pendidikan khusus tersebut, ilmu dan pengetahuan terkait dengan bidang kelautan telah dijadikan mata pelajaran utama, sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kompetensi yang cukup untuk dapat menerapkannya pada kehidupan nyata sehari-hari.

Pendidikan Bidang Kelautan di Indonesia

Di Indonesia terdapat sekitar 68 perguruan tinggi yang memiliki program studi terkait dengan bidang kelautan. Keberadaan perguruan tinggi tersebut sangat penting artinya dalam menghasilkan SDM perikanan dan kelautan yang memiliki integritas, kapabilitas dan kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuninya. Melalui perguruan tinggi inilah akan lahir generasi penerus yang akan melanjutkan kegiatan pembangunan bangsa dan negara dalam mewujudkan kejayaan perikanan dan kelautan nasional.

Apabila dilihat dari kuantitas perguruan tinggi yang memiliki program studi terkait dengan bidang kelautan tersebut, maka seharusnya kita memiliki SDM dengan kualitas yang memadai. Tetapi pada kenyataannya sering kali kita mendengar bahwa negara ini masih kekurangan SDM kelautan yang handal. Fenomena yang mengemuka tersebut mungkin saja benar dan mungkin juga salah. Hal yang patut menjadi perhatian adalah turunnya minat generasi muda dalam hal ini calon mahasiswa untuk mempelajari dan memahami bidang kelautan, karena masih memandang bidang ini tidak memiliki prospek masa depan yang cerah bila dibandingkan dengan bidang ilmu lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi dan penyatuan persepsi sehingga semua pihak mendapatkan informasi yang benar terkait dengan peluang dan tantangan di bidang kelautan, baik saat ini maupun masa yang akan datang.

Luasnya wilayah lautan yang kaya akan berbagai jenis sumber daya merupakan anugerah dari Sang Pencipta yang harus dimanfaatkan dengan arif dan bijaksana. Dalam konteks kelautan, maka upaya pemanfaatannya haruslah berpedoman pada prinsip kelestarian dan keberlanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada generasi mendatang sehingga masih dapat menikmati hasil sumber daya laut dan menjaga kelangsungan usaha yang ada saat ini. Tentu saja manusia memegang peran yang sangat dominan terhadap pencapaian tujuan tersebut.

Oleh karenanya, kebutuhan akan SDM kelautan yang handal harus disikapi dengan upaya peningkatan pendidikan bidang kelautan sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Kebutuhan akan SDM kelautan bukan hanya terbatas pada perikanan saja. Bidang lain yang masih terabaikan, diantaranya adalah industri transportasi laut, pariwisata bahari, pertambangan laut, dan teknologi kelautan. Memang permintaan terhadap pelaut Indonesia untuk bekerja pada kapal penangkapan asing, seperti China, Taiwan dan Jepang terus meningkat. Hal ini didukung dengan menurunnya minat pemuda pada masing-masing negara tersebut untuk bekerja pada sektor perikanan. Rata-rata, permintaan per tahun mencapai 10.000 orang dan jumlah tersebut belum dapat dipenuhi, karena kurangnya SDM pelaut Indonesia yang memenuhi standar internasional. Pelaut perikanan Indonesia di luar negeri, banyak bekerja pada kapal penangkap ikan tuna (long liner), kapal pukat cincin (purse-seiner) dan kapal pukat harimau (trawler) dan kapal pengangkut ikan. Pemegang sertifikat pelaut perikanan Indonesia, seperti MPL/AMKPL atau ANKAPIN/ ATKAPIN sebelum diberlakukannya konvensi *Standard Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnels* (STCW-F) 1995 masih diperbolehkan mengawaki kapal pengangkut ikan. Namun, dengan adanya penggolongan bahwa kapal pengangkut ikan sebagai kapal niaga maka pengawakan kapal pengangkut ikan oleh pemegang sertifikat MPL/AMKPL atau ANKAPIN/ATKAPIN tidak diperkenankan lagi (Wisudo dan Solihin, 2008).

Masih menurut Wisudo dan Solihin (2008), untuk menghasilkan SDM perikanan dengan standar internasional, maka diperlukan suatu wadah lembaga pendidikan yang memiliki kompetensi dalam menyiapkan SDM berkualitas internasional. Pendidikan yang dilakukan dalam lembaga tersebut mencakup penyesuaian pengetahuan dan ketrampilan bagi para pelaut perikanan berstandar konvensi International Maritime Organization (IMO) STCW-F 1995, sehingga para pelaut perikanan memiliki daya saing tinggi, memiliki knowledge dan skills tentang penyelamatan jiwa, harta di laut, menjaga lingkungan laut, serta mampu melaksanakan penangkapan ikan secara bertanggung jawab (sustainable fisheries). Hal ini juga harus didukung oleh sistem ujian pada lembaga uji yang independen, pengawakan yang sesuai dengan tingkat dan jenis sertifikatnya.

Peningkatan kebutuhan jumlah SDM kelautan dimasa kini dan mendatang, semestinya disikapi secara bijak oleh Pemerintah dengan mulai meningkatkan mutunya melalui pemerataan kesempatan pendidikan atau bahkan menyediakan sekolah khusus yang berlandaskan wawasan kebangsaan dan kelautan/kemaritiman, seperti SMA Taruna Nusantara Bahari. Semua pihak bertanggung jawab terhadap keberlanjutan kelautan nasional, karena apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang merupakan akumulasi dari kejadian-kejadian yang terjadi saat ini hingga nanti.

REKOMENDASI

1. Sistem Pendidikan Nasional, Kemendikbud, dan Kemenristekdikti berperan sangat strategis dan penting dalam melakukan re-orientasi generasi muda penerus bangsa kepada kesadaran wawasan nusantara berbasis kebaharian.
2. Kemdikbud dan Kemenristekdikti sudah semestinya dan sesegera mungkin memasukkan muatan kurikulum terkait dengan kebaharian, mulai dari pendidikan dasar (TK dan SD) dan menengah (SMP dan SMA) hingga ke pendidikan tinggi (Politeknik, Universitas, dan Insitut), guna menciptakan generasi masa depan Indonesia yang berwawasan bahari dalam membentuk kelautan sebagai poros kehidupan nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
3. Perubahan pola pikir dalam pendidikan untuk optimalisasi implementasi kurikulum kebaharian dalam membentuk kelautan sebagai poros kehidupan nasional dalam rangka mewujudkan poros maritim dunia, pada tahap awal diinisiasi dengan menambah muatan geografi/ilmu bumi, pelajaran renang, ekosistem/biologi laut, dan dasar-dasar kepelautan.
4. Guna mendapatkan calon-calon pemimpin bangsa masa depan yang mempunyai visi kemaritiman yang mumpuni dan komprehensif, maka disarankan Kemdikbud mendirikan SMA Taruna Nusantara Bahari.

Jakarta, 19 Agustus 2015

Dr. Nono Sampono, M.Si, S.Pi
Letnan Jenderal TNI (Marinir) Purn.

Keterangan :

*Makalah **IMPLEMENTASI KURIKULUM KEBAHARIAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL** ini disampaikan pada acara Seminar "**EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM LONGITUDINAL KEBAHARIAN**" yang diselenggarakan oleh Yayasan Hang Tuah, pada tanggal 19 Agustus 2015, bertempat di Wisma Elang Laut, Jakarta.*